

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2008:13) Objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Objek penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

#### **3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **3.2.1 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

###### **3.2.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)

## 5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem **MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah)**. Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi *door to door*.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama **MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah)**.

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara *door to door* menjadi *self assesment* yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

### **3.2.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandung**

Dispenda Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 23 Tahun tanggal 29 Mei 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41-101 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 05 tahun 2001, berkedudukan sebagai Unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan Operasional Kota Bandung Di Bidang Pendapatan.

Adapun Tugas Pokok dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung dengan Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Menyelenggarakan kesekretariatan

### **3.2.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang **BERMARTABAT** sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah, dengan masyarakat wajib pajak.
3. Terwujudnya aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif, efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.

6. Terwujudnya penegak hukum.
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan professional.
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.

Sarana merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak
3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20 % setiap tahun

4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT

#### **3.2.1.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Dari tujuan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan tercapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sarana meliputi program, kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi. Adapun kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan
2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak
3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan
4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan
5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat (wajib pajak)
2. Program menyusun dan menghitung potensi pajak
3. Program penyusunan standar pengolahan data Program pendayagunaan petugas
4. Program penyusunan sistem penggunaan pajak
5. Program penyusunan sistem penagihan pajak
6. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah melakukan organisasi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak
3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak
4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak
5. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak
6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
7. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak
8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media
9. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah
10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB

11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD
12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak
13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarifikasi perhitungan data pajak
14. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak
15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda
17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point PLN

### **3.2.1.5 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Visi dari Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung adalah “Profesional dalam Pengelolaan pendapatan Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang **BERMARTABAT** (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)”.

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

1. Profesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan

berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap

2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan

Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

### **3.2.1.6 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Struktur organisasi DISPENDA Kota Bandung berbentuk struktur fungsional, artinya seorang atasan mendelegasikan wewenang pada organisasi berdasarkan fungsi dan pemisahan tugas. Dalam struktur organisasi DISPENDA Kota Bandung diatas dapat diketahui bahwa Kepala Dinas menjabat sebagai pemimpin tertinggi dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub-sub Dinas, dan Kelompok Jabatan fungsional.

## **3.2.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

### **3.2.2.1 Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Pemerintah pusat dalam mengatur kepariwisataan di seluruh Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 yang berisi tentang pembentukan dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional tersebut mempunyai tugas utama yaitu membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan umum dibidang kepariwisataan nasional. Di dalam keputusan ini dicantumkan pula

tentang pembentukan Direktorat Jenderal Pariwisata dalam suatu Struktur Organisasi Departemen Perhubungan.

Masih pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden No. 9/1969 yang berisi tentang pembentukan Badan Pariwisata Nasional (BAPAPARNAS) dalam rangka untuk menjamin pembinaan dan pembangunan yang efektif dan berlanjut dalam pelaksanaan yang diusahakan oleh pihak pemerintah dan swasta. BAPAPARNAS bertugas untuk membantu Menteri Perhubungan dan Dirjen Pariwisata. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan No. SK. 71/ 11/ 1969, dibentuklah Dinas Pariwisata di tingkat daerah (Dinas Pariwisata Daerah/ DISPARDA).

Kemudian Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat membentuk Dinas Pariwisata Tingkat I Jawa Barat, setelah itu dibentuklah Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Bandung berdasarkan peraturan daerah No. II/ 1969, pada 20 tahun 1971 sampai dengan 1987 tercatat dengan nama Kantor Dinas Pariwisata (KAPARDA).

Sejak keluarnya peraturan daerah No. II/ 1985 tentang pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka sejak tahun 1987 KAPARDA diganti menjadi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Sejalan dengan adanya otonomi daerah Indonesia, seluruh tingkat Pemerintahan di Indonesia baik di pusat, propinsi, maupun kota dan kabupaten mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22/ 1999, Dinas Pariwisata daerah Tingkat II Kotamadya mengalami perubahan di antaranya yaitu :

1. Dinas Pariwisata daerah Tingkat II Kotamadya berubah namanya menjadi Dinas Pariwisata Kota Bandung.
2. Dinas Kota Bandung mendapatkan penambahan kewenangan yang lebih luas dalam urusan kepariwisataan di Kota Bandung, terhadap urusan Biro Perjalanan dan Hotel Berbintang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya memenuhi kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 22/ 1999 struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kota Bandung pun mengalami beberapa Perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tanggal 7 maret 2001 mengenai struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Bandung.

#### **3.2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2009– 2013 adalah **”MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENIBUDAYA DAN TUJUAN WISATA TAHUN 2013”**

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya) dan Kota Tujuan Wisata saat ini merupakan upaya yang secara intens di lakukan pada periode 2004 – 2008 akan dan perlu dimantapkan keberadaannya pada periode 2009 – 2013, sehingga Kota Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Adapun Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pencapaian Visinya adalah :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kepariwisata yang *Profesional*, Berkarakteristik Sunda Dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian;
3. Mengembangkan industri pariwisata yang *kratif, inovatif* dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;
4. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat *regional*, nasional maupun *internasional*;
5. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau Kab/kota/negara lain.

### **3.2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat diketahui bahwa dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kepala Dinas menjabat sebagai pemimpin tertinggi dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub-sub Dinas, dan Kelompok Jabatan fungsional.

#### **3.2.2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung**

Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:8) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### **3.3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian menurut Moh.Nazir (2008:84) adalah “Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausal, menurut Sugiyono (2008:37) hubungan yang bersifat sebab akibat, ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

### **3.3.2 Operasionalisasi Variabel**

Menurut Sugiyono (2008:60) “variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, data yang menjadi variabel ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Sementara variabel bebas (independen) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, data yang menjadi variabel independen adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata. Berikut tabel operasionalisasi variabel.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Pajak Hotel (X1)	“Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan Hotel” (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 1 ayat 9)	Realisasi Pajak Hotel	Penerimaan pajakm atas pelayanan hotel yang dipungut bayaran.	Rasio
Pajak Restoran (X2)	“Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran” (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Pasal 1 ayat 9)	Realisasi Pajak Restoran	Penerimaan pajak atas pelayanan restoran yang dipungut bayaran.	Rasio
Retribusi Objek Wisata (X3)	Iuran kepada pemerintah daerah atas pelayanan penyediaan segala sesuatu yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berwisata dan menikmati pelayanan-pelayanan yang disediakan tersebut.	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Tempat Rekreasi Tirtalega	Penerimaan retribusi dari adanya objek wisata.	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	“Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)	Realisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan dari Pajak Daerah</li> <li>- Penerimaan dari Retribusi Daerah</li> <li>- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</li> <li>- Penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah</li> </ul>	Rasio

### 3.3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2012:61). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata serat Pendapatan Asli Daerah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

#### 3.3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:62) sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengambilan *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Sugiyono (2012:68) menerangkan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata serta Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kota Bandung berturut-turut mulai tahun anggaran 2007-2011. Alasan pemilihan sampel mulai tahun anggaran 2007-2011 karena data yang ada pada tahun anggaran tersebut merupakan data yang terbaru yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

### 3.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting didalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah ilmiah, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan Pariwisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata serta Pendapatan Asli Daerah.
2. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berupa laporan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata serta Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008:240).

### 3.3.5 Perhitungan Pertumbuhan

Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan dengan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Realisasi pajak atau retribusi tahun ini} - \text{realisasi pajak atau retribusi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi pajak atau retribusi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

### 3.3.6 Rancangan Analisis Statistik

#### 3.3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

##### 1. Uji Normalitas

Yohanes, (2011:33) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya memiliki kecenderungan mendekati distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* satu arah atau analisis grafis. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_0 = 0$ , sampel berdistribusi normal
- 2)  $H_1 \neq 0$ , sampel berdistribusi tidak normal

Dasar keputusan normal atau tidaknya keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Z hitung  $>$  Z tabel, maka  $H_0$  diterima.
- 2) Jika nilai Z hitung  $<$  Z tabel, maka  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima

##### 2. Uji Multikolonearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). (Yohanes, 2011:101-102). Pada

program SPSS 17 dapat diuji ada tidaknya *multicollinearity* dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *VIF* lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi *multicollinearity*.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai *VIF* adalah:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

### 3. Uji Autokorelasi

Menurut Yohanes (2011:103) autokorelasi dapat diartikan sebagai adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), sedangkan satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual lainnya. autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Pengujian auto korelasi dapat dilakukan menggunakan pengujian *Durbin Watson*. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik *Durbin-Watson (D-W)*.

$$D - W = \frac{\sum(u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2}$$

Kriteria uji: Bandingkan nilai *D - W* dengan nilai *d* dari tabel *Durbin - Watson* :

- 1) Jika  $D-W < d_L$  atau  $D - W > 4 - d_L$ , kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
- 2) Jika  $d_u < D - W < 4 - d_u$ , kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
- 3) Tidak ada kesimpulan jika:  $d_L \leq D - W \leq d_u$  atau  $4 - d_u \leq D - W \leq 4 - d_L$

Apabila hasil uji Durbin – Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan *runs test*.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada semua pengamatan. Uji ini dapat dilakukan dengan mengamati *Scatter Plot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan *scartterplot model* yaitu melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (*ZPRED*) dan *studentized residual* (*SRESID*) Apabila terjadi pola yang beraturan antar titik-titik maka terjadi *heteroskedastisitas* tetapi jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

#### 3.3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel merupakan variabel bebas/variabel independen (*independent variable*) Pajak Hotel ( $X_1$ ), Pajak Restoran ( $X_2$ ) dan Retribusi Objek Wisata ( $X_3$ ) serta satu variabel lainnya

merupakan variabel terikat/variabel dependen (*dependent variable*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Didalam statistik hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (random atau stokastik). Suatu model regresi berganda dengan tiga variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variabel yang dependen dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana : Y = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)  
a = Konstanta  
b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien regresi  
X<sub>1</sub> = variabel bebas 1 (Pajak Hotel)  
X<sub>2</sub> = variabel bebas 2 (Pajak Restoran)  
X<sub>3</sub> = variabel bebas 3 (Retribusi Objek Wisata)  
e = Error

Dari analisis regresi linier berganda maka akan diperoleh koefisien regresi linier dari masing-masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien, pengujian dilakukan dengan pengujian koefisien Determinasi R<sup>2</sup> dan Koefisien Korelasi, Regresi secara Individual (t-test) dan secara (F-test).

### 3.3.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi  $R^2$  adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012), koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi ( $r^2$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus yang digunakan adalah:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

$K_d$  = koefisien determinasi

$r^2$  = koefisien korelasi dikuadratkan

### 3.3.6.4 Analisis Koefisien Korelasi

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bergantung secara bersama-sama dan mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. (Sugiyono, 2012)

Analisis koefisien korelasi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis korelasi *product moment*. Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. (Sugiyono, 2012:228)

Berikut ini dikemukakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi berganda:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi antara x terhadap y
- x = variabel A
- y = variabel B
- n = jumlah sampel

Langkah selanjutnya, memberikan interpretasi koefisien korelasi dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Yohanes (2011:68)

### 3.3.6.5 Uji F

Uji hipotesis simultan dilakukan dengan uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  secara simultan terhadap  $Y$  signifikan.

#### 1) Hipotesa

Pengujian dilakukan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$  : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

$H_1 : \beta \neq 0$  : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata secara simultan berpengaruh terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

#### 2) Uji Signifikansi

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%

#### 3) Kaidah keputusan

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  dan Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

Atau pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Versi 17:

- a) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Nilai probabilitas dari uji F dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig atau *significance*.

### 3.3.6.6 Uji t ( Uji Parsial)

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan.

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang bersifat terpisah (parsial) yaitu antar  $X_1$  dengan Y, dan  $X_2$  dengan Y dan  $X_3$  dengan Y

#### 1) Hipotesa

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara signifikan terdapat hubungan dengan variabel tidak bebas dilakukan uji t-statistik dengan melakukan hipotesa sebagai berikut:

a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penghasilan Asli Daerah :

$H_0: \beta = 0$ : Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

$H_1: \beta \neq 0$ : Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

b. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$H_0: \beta = 0$ : Pajak Restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

Hi:  $\beta \neq 0$ : Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung

c. Pengaruh Retribusi Objek Wisata terhadap Penghasilan Asli Daerah :

Ho:  $\beta = 0$ : Retribusi Objek Wisata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

Hi:  $\beta \neq 0$ : Retribusi Objek Wisata berpengaruh secara signifikan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

## 2) Penetapan Signifikansi

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%.

## 3) Kaidah Keputusannya :

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (signifikan).

Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima (tidak signifikan)

Atau didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Versi 17:

a) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

b) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *significance*.